

REVITALISASI KEMITRAAN TEMBAKAU VIRGINIA DI JAWA TIMUR

Samsuri Tirtosastro¹⁾ dan Taufik Iskandar²⁾

¹⁾PS. Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Tribhuwana Tungadewi

²⁾PS. Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Tribhuwana Tungadewi

Abstract

Cigarette industries in Indonesia especially nowadays still need to import some raw ingredients. The highest import for 10 years (2001-2010) is from China *i.e.* for about 28,288,197 ton/year or 53.38% from import total of the total import of 52,999,855 kg/year with a value of USD 127.149.050/year. The price of dried tobacco leaves from China is only USD 1,996/kg or 83.84% from the average price of import dried tobacco leaves. Base on these data, it is showed that most local cigarette industries need to have dried tobacco leaves with medium quality and low price. Opportunity for East Java to develop virginia tobacco is high enough. East Java not only has quite potential area, but also has technology packages which are sufficient enough to increase productivity up to 2,000kg/ha or more. The weakness is the system for guiding farmers. There is no link in the technology partnership, production tools, furthermore marketing resulted in low productivity and quality. As a fancy product there should be a link between farmers as producers and tobacco industries as consumers for all sub-systems of virginia tobacco farming business. Cooperation of producers, consumers, and local governments is the basic framework of the system for guiding. Producers and consumers had more cooperation in the aspects of production and quality improvement. Local government regulations governed on all parties working together based on justice. Farmers as producers are obliged to apply the technology built and sell dried tobacco leaves according to the company's pricing agreement builder.

Key words: revitalization, partnership, virginia tobacco

Pendahuluan

Komoditas tembakau virginia, adalah komoditas kontroversial. Sebagian masyarakat nasional dan internasional, tidak menginginkan komoditas ini karena dampak negatifnya terhadap kesehatan individu maupun masyarakat. Pada sisi yang lain, komoditas ini masih sangat diinginkan karena dampak positif terhadap pendapatan petani, penyerapan tenaga kerja, tumbuhnya industri rumah tangga (widig, keranjang, tikar) dan industri raksasa (filter, plastik, kertas, kreatif). Selain itu perokok juga merasa

sangat diringankan beban mental dan ditingkatkan harga dirinya. Beberapa kelompok elit tertentu juga berpendapat bahwa pelarangan merokok dilatar belakangi oleh kepentingan bisnis tertentu dengan mengorbankan bisnis tembakau dan produk tembakau (Fauzi, 2010; Hamilton, 2010). Pemerintah sendiri, khususnya dari instansi terkait masih berpendapat bahwa komoditas tembakau masih perlu dibina dan ditingkatkan produksi dan efisiensinya. Komoditas ini masih belum tergantikan oleh komoditas lain dan masih menjadi

pilihan utama masyarakat khususnya petani tembakau (Anonymous, 2005). Dalam usaha menghadapi berbagai masalah pengembangan tembakau, masyarakat tani dan pengusaha tembakau, bersama pemerintah perlu merapatkan barisan. Bagi petani sebagai produsen, perlu meningkatkan produksi dengan mutu sesuai permintaan konsumen, selain mutu rendah bahan berbahaya didalamnya dan harga yang layak. Bagi pengusaha tembakau, mutu sesuai “selera konsumen dan rendah bahan berbahaya di dalamnya” hanya dapat terjadi jika konsumen terlibat dalam proses produksi, khususnya penyusunan paket teknologi. Selera konsumen bersifat dinamis, selalu berubah mengikuti selera para perokok. Parameter mutu tembakau yang bersifat subyektif dan mudah dipalsukan, lebih menegaskan lagi peran konsumen tembakau untuk membangun kebersamaan dengan petani sebagai produsen tembakau. Komponen kimia berbahaya, apakah residu pestisida, atau akibat pengolahan seperti TSNA (*tobacco spesific nitrosamine*, B-a-P (*benzo-a-pyrene*) dan bahan asing yang terbawa seperti NTRM (*non tobacco related material*) sampai saat ini masih sangat dinamis dan hanya industri rokok yang memahami. Sehingga pengembangan tembakau ke depan harus dibangun bersama industri rokok dan para eksportir tembakau. Peran Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah sangat diperlukan agar dua pihak yang bermitra tersebut berlangsung sinergis dan saling menguntungkan.

Penelitian ini menyajikan konsep kemitraan sinergis antara pemerintah daerah, petani dan konsumen. Pada dasarnya akan diketengahkan strategi menjalin kemitraan dengan prinsip kesetaraan dan berkeadilan. Peluang pengembangan tembakau virginia melalui kemitraan sinergis, sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan petani, penyerapan tenaga kerja dan sektor jasa yang lain serta rendah kadar bahan berbahaya di dalamnya.

Kebutuhan Krosok FC Nasional

Jumlah dan fungsi komponen tembakau didalam racikan (*blend*) rokok sulit dipastikan karena 3 hal: 1). racikan merupakan rahasia perusahaan, sehingga tidak akan mudah diinformasikan; 2). racikan bersifat dinamis, selalu berubah setiap saat, untuk memenuhi selera konsumen; 3). fungsi satu komponen tembakau tidak selalu mutlak, khususnya untuk tembakau dengan status pelengkap (*filler*) atau bukan penentu rasa dan aroma. Berdasarkan data produksi, volume impor dan volume ekspor, konsumsi krosok fc (2001-2010), sebesar 90.182 ton/th (Tabel 1). Volume impor mencapai 53.010 ton/thn dengan nilai US\$ 120,449,989/th (Tabel 1). Produksi tembakau virginia fc nasional hanya menyumbang 41,22%. Harga krosok fc impor berkisar antara US\$ 1,777-3,902/kg, dengan harga rata-rata US\$ 2,400/kg. Lebih dari 50 negara menjadi pemasok (*supplier*) kebutuhan krosok fc .

Tabel 1. Konsumsi dan nilai impor tembakau virginia (2001-2010)

Tahun	Konsumsi			Nilai				
	Produksi (ton)	Impor kg	Ekspor kg	Konsumsi (ton)	Ekspor US\$	US\$/kg	Impor US\$	US\$/kg
2001	64.951	62.258	3.897	123.313	5,700,194	1.463	110,619,993	1.777
2002	50.319	41.972	7.920	84.371	5,113,707	0.646	72,677,179	1.732
2003	47.767	36.711	4.865	79.614	4,446,751	0.914	69,687,949	1.898
2004	42.828	43.722	12.608	73.942	18,959,495	1.504	91,836,559	2.100
2005	45.594	53.656	15.826	83.424	24,682,829	1.560	107,859,117	2.010
2006	43.184	55.889	11.115	87.958	17,676,881	1.590	105,119,363	1.881
2007	46.765	67.484	13.841	100.408	30,322,927	2.191	149,199,913	2.211
2008	53.634	71.060	13.258	111.436	32,545,509	2.455	187,139,612	2.634
2009	59.506	44.907	17.720	86.692	58,556,358	3.304	175,244,696	3.902
2010	42.504	52.439	24.282	70.661	79,484,385	3.273	202,106,117	3.854
Rata-rata/th	49.705	53.010	12.533	90.182	27,748,904	1.890	127,149,050	2.400

Sumber: Anonymous (2010), Anonymous (2001 s/d 2010^a), Anonymous (2001 s/d 2010^b)

Tabel 2. Impor krosok fc (*flue-cured*) berdasar klasifikasi harga dan negara asal

Kelompok	Asal	Volume		Harga		Harga	
	Negara	Kg	%	US\$	%	US\$ /Kg	%
I <u>Harga</u> : - 2-3 US\$/kg) <u>Volume</u> : - >1000 ton	China	28.288.197	53,38	56,467,105	44,41	2.00	83,21
	Brazil	8.787.820	16,58	22,961,532	18,06	2.61	108,92
	Turkey	2.987.390	5,64	8,327,086	6,55	2,79	116,19
	Zimbabwe	2.234.905	4,22	6,067,267	4,77	2,72	113,16
	India	1.359.392	2,57	3,795,182	2,99	2,79	116,37
	Grece	1,317,289	2,49	3,137,604	2,47	2,38	99,29
	Jumlah	44.974.993	84,88	100,755,776	79,25	2,55	106,19
II <u>Harga</u> : - >3US\$/kg) <u>Volume</u> : - >1000 ton	United States	3,818,718	7,21	16,890,968	13,29	4,42	184,38
	Jumlah	3.818.718	7,21	16890,968	13,29	4,42	184,38
III Diluar ketentuan kelompok I dan II	41 negara (Pakistan, Kenya, Singapura dll)	4.206.144	7,91	9,502,306	7,46	2,30	95,83
	Jumlah	4.206.144	7,91	9,502,306	7,46	2,30	95,83
Total		52.999.855	100	127,149,050	100	2,40	100

Jika impor krosok fc dikelompokkan berdasar harga dan volume, masing-masing lebih dari 1.000 ton/th dan harga US\$ 2-3/kg dan lebih US\$ 3/kg, serta diluar volume dan harga tersebut, diperoleh kelompok pemasok seperti Tabel 2. Krosok dengan harga US\$ 2-3/kg atau sekitar Rp. 18.000-27.000 dianggap sebagai mutu sedang, sedangkan lebih dari Rp. 27.000 atau US\$ 3/kg dianggap krosok mutu tinggi. Krosok fc produksi Lombok, mutu baik mencapai Rp. 30.000-40.000/kg. Sesuai Tabel 2, sebanyak 52,62% impor berasal dari China dengan harga rata-rata hanya US\$ 1.996/kg atau hanya 83,21% dari harga rata-rata impor. Hal ini memberi petunjuk bahwa krosok fc yang diperlukan untuk konsumsi dalam negeri, sebagian besar adalah krosok mutu sedang dan dapat diproduksi oleh beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur.

Perilaku dan Kemitraan Tembakau di Jawa Timur

Perilaku konsumen krosok fc (flue-cured)

Konsumen adalah pembeli tembakau dari petani, untuk tujuan digunakan sendiri atau dijual ke industri rokok khususnya rokok kretek dan untuk ekspor. Berdasarkan kriteria industri rokok pelanggannya, konsumen tembakau dibagi menjadi 2 kelompok: 1) kelompok yang menjadi pelanggan industri yang menghasilkan rokok kelas premium. Rokok premium adalah rokok kelas tinggi, yang dibuat dengan racikan dan proses yang baku atau standar. Secara umum rokok premium lebih diterima oleh masyarakat perokok atau mempunyai pangsa pasar lebih tinggi. 2) kelompok yang menjadi pelanggan industri rokok non premium. Rokok non premium umumnya dibuat berdasar kepaiawaian seorang peracik (*blender*) dan dibuat dari tembakau dengan mutu

beragam. Rokok non premium umumnya kurang bertahan di pasaran, meskipun diikuti promosi dan penampilan yang cukup baik.

Produsen rokok premium menginginkan tembakau yang ditanam dan diolah serta dalam perdagangan disajikan dengan baku teknologi tertentu. Rokok premium memerlukan tembakau krosok fc dengan mutu sesuai SNI-Tembakau Virginia fc (Anonymous, 1996). Selain itu juga menetapkan bahwa tembakau dalam proses produksi mengacu pada usaha menekan bahan berbahaya didalamnya sesuai ketentuan GAP (*Good Agricultural Practices*) dan GMP (*Good Manufacturing Practices*). TSNA (*Tobacco spesifik nitrosamine*), B-a-P (*benzo-a-pyrene*) dan NTRM (*non tobacco related material*) harus diusahakan serendah mungkin dan di mulai dari penyiapan lahan, sampai dengan proses produksi dan penyajian dalam perdagangan (Coresta, 2005).

Pemasaran tembakau dengan mutu beragam, sangat mengganggu pengembangan pertembakauan nasional. Demikian juga pencampuran antar jenis, antar daerah, antar posisi daun pada batang, penambahan gula dan lain-lain tanpa batasan yang jelas menjadikan mutu tembakau menjadi sangat tidak ideal sebagai bahan baku rokok premium. Untuk mencapai peningkatan produksi dan penataan mutu yang baik dan efisien sangat diperlukan standarisasi teknik budidaya dan pengolahan. Permasalahan ke depan adalah membawa bahan baku untuk rokok rokok non premium yang beragam, menggunakan bahan baku yang lebih seragam, yang sistem produksinya terkendali dengan baik. Hal yang terakhir ini sangat penting untuk menata sistem produksi tembakau, khususnya yang terkait dengan pengendalian bahan berbahaya didalamnya (Tamboenan, 1959).

Kemitraan teknologi

Untuk mencapai tujuan efisiensi sistem produksi, yang berdampak positif terhadap pendapatan petani, pemenuhan selera konsumen, keamanan produk tembakau yang menjadi kunci utama adalah *masuknya teknologi yang sesuai pada tingkat petani*. Atas dasar pertimbangan bahwa paket teknologi yang sesuai terkait dengan mutu, dan yang dapat mengerti mutu adalah konsumen, kerjasama petani dan konsumen mutlak diperlukan. Sehingga kemitraan antara konsumen dan produsen tembakau merupakan *kunci keberhasilan pembangunan perbakaan* khususnya di Jawa Timur.

Pada saat ini kerjasama antara petani dan konsumen lebih banyak dalam bentuk kerjasama parsial. Perusahaan lebih banyak berperan sebagai mitra pasar, bukan mitra teknologi atau mitra biaya usahatani atau mitra sosial yang lain. Peluang penerapan teknologi, meskipun sudah dicanangkan oleh berbagai pihak relatif kecil, karena hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak ada sangsi langsung, jika saran tidak dilaksanakan.
2. Untuk melaksanakan belum tentu tersedia sarana produksi atau sarana pelengkap yang lain.
3. Tidak ada jaminan kalau teknologi saran diterapkan membawa perbaikan penerimaan petani.
4. Produk yang dihasilkan selalu terbeli, meskipun mutu dikatakan rendah dan akan ditolak oleh pasar.
5. Tembakau tetap kompetitif dan memberikan nilai ekonomi tinggi kepada petani.

Sistem Pembinaan Tembakau Virginia

Era sebelum dan sesudah kemerdekaan

Berdasar kurun waktu keberadaan tembakau virginia di Indonesia,

khususnya di Jawa Timur, sistem pembinaannya dapat diklasifikasi seperti pada Lampiran 1. Pada awalnya, PT. BAT dengan bantuan Pemerintah Kolonial melakukan pembinaan petani dengan penerapan sistem usahatani dari negara asal tembakau virginia. Petani selalu mengikuti petunjuk petugas lapang dengan baik, meskipun hasilnya masih belum memadai. Sampai dengan menjelang kemerdekaan produktivitas hanya mencapai 8.00-1.000 kg/ha. Krosok ordonantie 1938 menetapkan agar semua perusahaan pengolah daun tembakau ikut membina petani. Antara lain ada kewajiban setiap oven tembakau ukuran 6 x 6 x 7 m, kapasitas 5-6 ton daun tembakau, wajib menyediakan 40 bedengan, ukuran 5x1m, yang bibitnya diserahkan gratis kepada petani. Pada era kemerdekaan Krosok-Ordonantie 1938 diperkuat dengan UU No. 22 tahun 1958, tentang perubahan Krosok-Ordonantie 1938. Pada UU tersebut perusahaan swasta masih diwajibkan untuk membantu pembinaan petani agar dihasilkan tembakau yang sesuai permintaan konsumen. Di Jawa Timur Undang-Undang ini diimplementasikan dalam Peraturan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. Pem/308/G, tanggal 10 Juni 1969. Pada Peraturan ini, dicantumkan juga setiap pemilik alat perajang dengan kapasitas 200 kg daun/hari diwajibkan menyediakan 20 bedengan yang diberikan kepada petani secara gratis.

Namun demikian, sistem pembinaan yang tetap memberikan garis pemisah antara petani dan konsumen, tetap tidak mampu meningkatkan produktivitas dan mutu sesuai permintaan konsumen. Masuknya diversifikasi pengolahan menjadi tembakau rajangan, menjadikan pembinaan tembakau virginia di Jawa Timur, khususnya konsumen krosok fc makin menurun. Penggunaan

varietas tidak murni, bibit kurang kuat, pupuk nitrogen berlebih, tumpangsari dengan jagung, tanpa pemangkasan dan lain-lain mendorong dihasilkan daun tipis, produktivitas dan mutu makin rendah. P. N. Perkebunan XIX melakukan pembinaan dengan pinjaman sarana produksi dan obat-obatan sekitar tahun 1975-1980 (Lampiran 1). Petani tetap tidak menjadi pelaku agroindustri atau pengolah, tetapi hanya sebagai penjual daun hijau. Hasilnya perusahaan ini tidak memperoleh daun yang baik dari petani. Demikian juga usaha beberapa perusahaan seperti PT. Gudang Garam, PT. Djarum dan PT. Bentoel yang mencoba membina petani dengan pinjaman dana dari bank pemerintah pada tahun 1980-1983 hasilnya juga kurang memadai. Kebanyakan petani binaan menjual daun bermutu baik ke pembeli-pembeli lain bukan perusahaan pembina dengan harga lebih tinggi.

Kemitraan sinergis

Beberapa perusahaan yang meninggalkan daerah Bojonegoro, mulai membina petani lebih intensif di daerah Lombok, Bali dan Bondowoso dan Sulawesi Selatan. Pengembangan di daerah tersebut menggunakan sistem kemitraan sinergis dengan petani sebagai pelaku agribisnis. Penjualan dalam bentuk krosok fc atau petani sebagai penanam, pengolah dan distribusi atau pemasaran. Sukses paling besar dicapai oleh pulau Lombok dapat meningkatkan areal dari 3600 ha pada 1990 menjadi lebih dari 20.000 ha pada 1999. Produktivitas naik dari sekitar 1.000 kg/ha menjadi 2.000-2.500 kg/ha, dengan kenaikan rata-rata 3-4%/th. Fluktuasi produktivitas terjadi cukup tajam, tetapi penyebabnya adalah penyimpangan iklim yang belum dapat tertanggulangi dengan pendekatan teknologi. Daerah-daerah lain mengalami kegagalan, meskipun sistem pembinaan di

daerah-daerah lain tersebut pada dasarnya adalah sama dengan di Lombok. Penyebab kegagalan berbagai daerah tidak sama. Sulsel ditinggalkan PT. BAT karena kadar khlor yang tinggi. Di Bondowoso banyak perusahaan ikut melakukan kemitraan dengan petani. Tetapi seluruhnya sudah meninggalkan daerah ini. Terakhir PT. BAT terpaksa mengentikan kegiatan kerjasama pembinaan dengan petani 1980. Umumnya alasan penutupan adalah banyak petani binaan yang tidak menjual hasil tembakau ke perusahaan pembinaannya. Di Bali akibat areal pengembangan yang relatif terbatas dan hanya berkisar antara 1.500-2.500 ha/th. PT. BAT, PT. Sadana Arifnusa sudah lebih lama meninggalkan Bali dan hanya PT. Gudang Garam yang bertahan dan beberapa perusahaan lain. Menjelang tahun 2000 ada dua perusahaan melakukan pembinaan di daerah Blitar. Tetapi areal pengembangan terbatas hanya mencapai 200-300 ha saja. Nampaknya tanaman alternatif yang lebih mudah diusahakan, meskipun hasilnya dibawah pendapatan tembakau menjadi pilihan petani.

Beberapa daerah lain seperti Lumajang (BAT, 1996), Jember Selatan dan lain-lain juga mulai mengembangkan tembakau virginia. Demikian juga di Cirebon, Yogyakarta dan terakhir Lampung mulai mengembangkan tembakau virginia. Cirebon sudah berhenti beberapa tahun lalu, di Yogyakarta dan sekitarnya perkembangannya juga kurang nyata. Di Lampung PT. ELI dan kemudian disusul PT. Sadana Arifnusa masih sedang berjalan. Sumatra Utara juga mulai meningkatkan kembali pengembangan tembakau virginia, yang sudah di mulai beberapa tahun lalu.

Sekitar tahun 1996 PT. Gudang Garam mencoba memasukkan teknologi

secara intensif pengembangan tembakau petani binaannya (Lampiran 1). Pembinaan dilakukan melalui varietas unggul, pupuk terpilih, cara panen dan perajangan secara benar dan lain-lain. Semua komponen teknologi diawasi dengan saksama melalui pedagang-pedagang perantara dan tenaga teknis yang dimiliki perusahaan tersebut. Hasilnya sampai dengan saat ini menunjukkan peningkatan mutu dan produktivitas cukup baik. Namun demikian perusahaan ini sesuai kebutuhan, hanya membina petani sesuai kebutuhan. Diperkirakan hanya 3.000-4.000 ha/th atau separuh areal tembakau virginia di Bojonegoro yang memperoleh binaan intensif.

Berdasarkan uraian tersebut di atas daerah Lombok paling berhasil mengembangkan tembakau virginia dengan hasil krosok fc. Keberhasilan Pulau Lombok akibat dukungan sumberdaya alam, khususnya tersedianya air pengairan minimal 1-2 kali selama pertumbuhan. Lahan-lahan dengan bahan induk abu vulkan yang relatif porous cukup baik untuk pertumbuhan perakaran. Tetapi faktor kunci keberhasilan Pulau Lombok adalah adanya sistem pembinaan yang dilengkapi perangkat lunak seperti Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, kesepakatan bersama dan lain-lain. Pertemuan-pertemuan koordinasi untuk mendiskusikan berbagai hal dan langkah bersama oleh Pemerintah Daerah selalu dihadiri oleh pimpinan puncak perusahaan tersebut.

Sistem pembinaan melalui kemitraan sinergis didasarkan pada pasal 12 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2006, tentang Usaha Budidaya Dan Kemitraan Perkebunan Tembaku Virginia Di NTB (Anonymous, 2006): 1). Badan Usaha melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai,

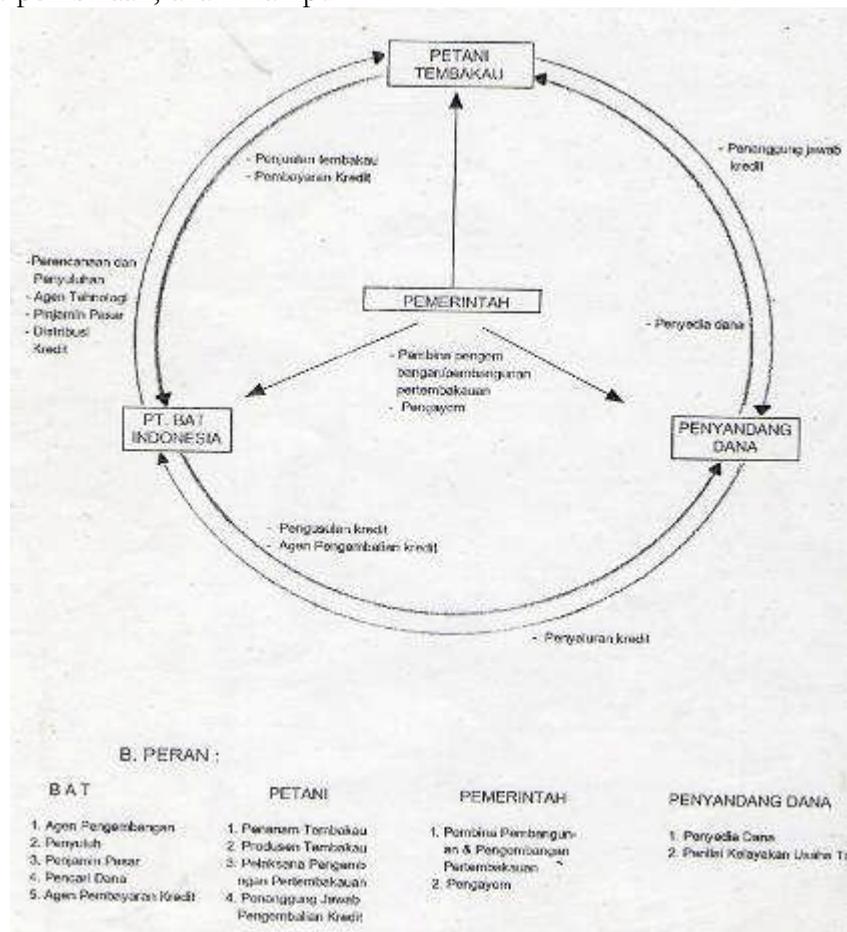
saling bertanggung-jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, dan masyarakat sekitar perkebunan. 2). Kemitraan usaha budidaya sebagaimana dimaksud ayat (1), polanya dapat berupa kerjasama penyediaan sarana produksi, kerjasama produksi, pengolahan dan jasa pendukung lainnya. Namun demikian kedua pasal ini belum memberikan dukungan pada standarisasi pembinaan yang harus dilakukan oleh semua perusahaan. Perusahaan-perusahaan besar yang menjadi pemasok pabrik rokok besar, melakukan kemitraan sinergis mencakup kerjasama pengadaan sarana produksi, system produksi, pasar dan jasa pendukung lainnya. Sedang yang lain tidak seluruhnya dipenuhi. Sehingga terjadi keragaman sistem pembinaan yang dilakukan oleh perusahaan yang sekaligus sebagai konsumen. Hal ini berdampak kurang baik pada pembentukan sistem pasar yang sehat. Secara skematis bentuk kemitraan sinergis seperti pada Gambar 1.

Peluang keuntungan perusahaan mitra

Perusahaan yang tidak melakukan kemitraan keuntungan yang diperoleh merupakan selisih biaya usaha terhadap harga penjualan kepada pelanggan. Pada perusahaan yang melakukan pembinaan petani, keuntungan diperoleh dari selisih biaya usaha ditambah biaya pembinaan terhadap harga jual. Berdasarkan pertimbangan beberapa perusahaan dapat melakukan pembinaan dengan baik, atau bagi perusahaan ini mutu baik merupakan target usaha untuk memperoleh keuntungan. Artinya perusahaan ini mempunyai pelanggan tembakau mutu baik dan tertata dengan baik, dan memberi dapat peluang keuntungan terhadap perusahaan tersebut. Namun demikian dalam melakukan pembinaan terjadi kendala, tembakau yang

memperoleh sentuhan teknologi karena binaan perusahaan tersebut, tidak dijual kepada perusahaan pembinaanya. Perusahaan non mitra karena tidak terbebani biaya pembinaan, akan mampu

melakukan pembelian lebih agresif dibanding perusahaan pembina. Sehingga biaya pembinaan akan merugikan atau membebani perusahaan mitra.



Gambar 1. Skema kemitraan sinergis antara petani, perusahaan dan pemerintah daerah

Kendala terakhir tersebut di atas banyak terjadi pada pembinaan pengembangan tembakau yang dilakukan oleh perusahaan sejak lama, seperti diuraikan di atas. Untuk mencapai tujuan peningkatan produksi dan mutu, nilai ekonomi komoditas khususnya terkait pendapatan petani serta efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam, perlunya pemerintah daerah menetapkan regulasi yang mengatur sistem pembinaan oleh perusahaan. Peluang perusahaan memperoleh atau membeli tembakau dari petani binaan dengan harga kesepakatan,

yang diketahui pemerintah perlu diatur oleh pemerintah.

Peran pemerintah daerah

Kelemahan umum yang terjadi pada sistem kemitraan, khususnya pada pengembangan komoditas tembakau di Jawa Timur, adalah peluang perusahaan untuk memperoleh tembakau hasil binaan dari petani yang sangat kecil. Padahal membina petani memerlukan biaya, khususnya tenaga penyuluh dan penyediaan paket-paket teknologi. Hal ini

dapat terjadi akibat beberapa hal sebagai berikut:

1. Mutu tembakau hasil binaan perusahaan lebih tinggi dibanding non binaan. Akibatnya banyak perusahaan lain yang berminat untuk membeli meskipun dengan harga lebih tinggi.
2. Kesadaran semua pihak, khususnya Petani dan Pemerintah Daerah bahwa keterlibatan Perusahaan atau konsumen tembakau hanya dapat terjadi jika perusahaan tersebut memperoleh tembakau dari petani binaan dengan harga ekonomis. Terbitnya regulasi untuk melindungi semua pihak yang sudah berbuat untuk kepentingan pengembangan tembakau sangat diperlukan saat ini.
3. Kesadaran semua perusahaan, untuk berkompetisi diluar sistem pengadaan bahan baku, khususnya pengadaan tembakau yang bermutu tinggi.
4. Lemahnya unsur penunjang, khususnya Balai Penelitian yang masih memprioritaskan satu sisi aspek teknologi. Seharusnya program penelitian disusun berdasar usaha memecahkan semua masalah di lapangan, sehingga pengembangan tembakau dapat terlayani kebutuhan teknologinya dengan baik.

Kesimpulan

1. Sistem kemitraan tembakau di Jawa Timur perlu diperbaiki melalui standarisasi kemitraan dengan belajar dari keberhasilan penerapan kemitraan sinergis tembakau virginia di Lombok.
2. Pembinaan pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten secara langsung melalui regulasi sistem kemitraan sangat diperlukan.
3. Untuk meningkatkan semangat semua pihak, perlunya pemerintah

daerah memberikan bantuan teknis sampai sarana produksi dan membentuk Badan Pengelola Kemitraan.

Daftar Pustaka

- Anonymous. 1996 s/d 2010^a. Statistik perdagangan luar negeri. Ekspor 1996 sampai dengan 2010. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Anonymous. 1996 s/d 2010^b. Statistik perdagangan luar negeri. Impor 1996 sampai dengan 2010. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Anonymous. 1996. SNI 01-4401-1996: Standar Nasional Indonesia Tembakau Virginia flue-cured. Badan Standarisasi Nasional. Jakarta.
- Anonymous. 2005. Substitusi Dan Diversifikasi Lahan Tembakau Di Jawa Timur. Laporan survai: Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dan Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Tanaman Serat. Surabaya.
- Anonymous. 2006. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 4 Tahun 2006. Usaha Budidaya Dan Kemitraan Perkebunan Tembaku Virginia Di Nusa Tenggara Barat.
- Anonymous. 2010. Dinamika Usahatani Tembakau di Jawa Timur. Forum Usahatani Tembakau Jawa Timur. Surabaya.
- Coresta. 2005. Good Agricultural Practices (GAP) Guidelines. Guide No. 3. <http://www.coresta.org>.
- Fauzi, N. 2010. Siapa Bilang Merokok Harom ?. Surya Pena Gemilang Publisher Malang, Jawa Timur. Malang.
- Hamilton, W. Nicotine W. 2010. Perang Nikotin Dan Para Pedagang Obat. Terjemahan: Sigit Djatmiko. Insist Press. Yogyakarta. Spasimedia-Jakarta.
- Tamboenan, W. G., P. T. A. Abdullah dan A. Hamid. 1959. Penyelidikan Untuk Memperoleh Varietas Tembakau Virginia Yang Cocok Buat Daerah Bojonegoro. Teknik Pertanian. VIII. No. 9-12. Jakarta.

Lampiran 1. Sistem pembinaan tembakau virginia berdasarkan waktunya

Tahun	Pembina	Pembeli krosok fc	Hasil	Keterangan
1925-1945	PT. BAT Pemerintah Belanda	PT. BAT	0,75-1,25 ton/ha (lemon) Petani mengikuti petunjuk Petani jual daun	Zaman penjajahan Krosok ordonantie (1938) Didirikan kebun percobaan Bojonegoro dan sekitarnya
1945-1975	PT. BAT Pemerintah RI HPTI (sesuai krosok ordonantie 1938)	PT. BAT Perusahaan swasta lain HPTI (pengolahan dan perdagangan tembakau)	0,75-1,25 ton/ha (lemon) Petani Jual daun Petani mulai kurang taat Daun pucuk(tebal) mulai dirajang	Zaman republik Penelitian giat dan jalan baik Areal meluas (Mojokerto sampai Ngawi, Solo, Klaten, Bondowoso) Bali-Lombok, Sulsel daerah baru
1975-1990	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Pemerintah ▪ HPTI (mulai menurun) ▪ P. N. P. XIX ▪ PT. BAT (menurun) ▪ Industri rokok kretek 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri rokok kretek (rajangan, daun tengah) ▪ PT. BAT keluar dari Bojonegoro. ▪ MGS : Sulsel, Bondowoso, Bali, Lombok ▪ P.N.P. XIX 	0,75-1,25 ton/ha (lemon) Petani jual daun Petani tidak taat teknologi (tanpa pangkas, tumpangsari, pupuk ZA/urea, jual daun di pasar)	Areal Bojonegoro menurun Produksi rajangan meningkat (75-80%) Ngawi, Mojokerto. Klaten, DIY menurun
1990-2008	Dinas Pemerintah Suplier/Industri rokok PT. BAT, Djarum, SDN, PMI dll. (Bondowoso, Bali, Lombok) GG (Bojonegoro)	Industri rokok kretek P.T. BAT Perusahaan Swasta lain GG (Bojonegoro)	Bojonegoro (1,00-1,25) Lombok (1,75-2,00) Bali, Bondowoso (1,5-1,75 ton/ha)	--